

TELAAH ATAS PERLAWANAN RADEN TRUNOJOYO TERHADAP KOALISI VOC DAN MATARAM ISLAM SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PENETAPAN SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL

Aris Hardinanto

Universitas Trunodjoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

E-mail: aris@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi posisi historis Raden Trunojoyo dalam perlawanan terhadap koalisi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Mataram Islam serta menganalisis kelayakannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang dipadukan dengan pendekatan filologi serta analisis hukum. Sumber utama penelitian meliputi Dag Register Gehouden int Casteel Batavia vant Passerende daer ter Plaetse als Over Geheel Nederlandts-India dan Babad Trunajaya CS 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Raden Trunojoyo yang semula berakar pada pertentangan politik dengan Mataram mengalami transformasi setelah VOC bersekutu dengan Amangkurat II dan melakukan intervensi militer secara langsung. Deklarasi perang VOC, pengerahan pasukan dan logistik, ekspedisi menuju Kediri, serta pengejaran Raden Trunojoyo hingga akhir perlawanannya di Malang menunjukkan bahwa perang tersebut berkembang melampaui konflik dinasti menjadi perlawanan terhadap koalisi VOC dan Mataram Islam. Pembacaan filologis terhadap Babad Trunajaya CS 15 memperkuat arsip VOC dengan menggambarkan keterlibatan langsung pasukan Kompeni dalam pertempuran serta kepemimpinan Trunojoyo di medan perang. Konvergensi kedua tradisi sumber tersebut menunjukkan bahwa perlawanan Trunojoyo terhadap VOC memiliki dasar historis yang kuat dan bukan sekadar konstruksi historiografi modern. Secara yuridis, telaah historis tersebut memberikan dasar bahwa perjuangan, kepemimpinan, keteguhan, pengorbanan, dan perlawanan Raden Trunojoyo terhadap ekspansi kolonial VOC memenuhi persyaratan substantif untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Kata-kata Kunci: trunojoyo; madura; perlawanan; kolonialisme

A STUDY OF RADEN TRUNOJOYO'S RESISTANCE AGAINST THE VOC AND ISLAMIC MATARAM COALITION AND ITS RELEVANCE TO HIS RECOGNITION AS A NATIONAL HERO

ABSTRACT. This study aims to reconstruct Trunojoyo's historical position in the resistance against the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) and to assess his eligibility for recognition as a National Hero under Law Number 20 of 2009 on Titles, Medals, and Honors. The study employs the historical method through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, combined with a philological approach and normative legal analysis. The primary sources include the Dag Register Gehouden int Casteel Batavia vant Passerende daer ter Plaetse als Over Geheel Nederlandts-India and Babad Trunajaya CS 15. The findings demonstrate that Trunojoyo's conflict, initially rooted in political confrontation with Islamic Mataram, underwent a significant transformation after the VOC allied itself with Amangkurat II and directly intervened militarily. The VOC's declaration of war, deployment of troops and logistical resources, expedition to Kediri, and pursuit of Trunojoyo until the final stage of his resistance demonstrate that the war developed beyond a dynastic conflict into resistance against the VOC and Islamic Mataram coalition. A philological reading of Babad Trunajaya CS 15 di Malang corroborates the VOC archives by depicting the direct involvement of Company forces in battle and Trunojoyo's leadership on the battlefield. The convergence between these two distinct source traditions demonstrates that Trunojoyo's resistance against the VOC has a strong historical foundation and is not a construction of modern historiography. From a legal perspective, this reconstruction provides a basis for concluding that Trunojoyo's struggle, leadership, perseverance, sacrifice, and resistance against VOC colonial expansion satisfy the substantive requirements for consideration as a National Hero pursuant to Articles 25 and 26 of Law Number 20 of 2009.

Keywords: trunojoyo; madura; resistance; colonialism;

PENDAHULUAN

Penilaian terhadap seorang tokoh sejarah sebagai pahlawan nasional tidak cukup

didasarkan pada pembentukan narasi heroik ataupun penerimaan tanpa kritik terhadap sumber sejarah. Bambang Purwanto mengemukakan bahwa historiografi Indonesia masih kerap

Telaah Atas Perlawanan Raden Trunojoyo Terhadap Koalisi VOC dan Mataram Islam Serta Relevansinya

Terhadap Penetapan sebagai Pahlawan Nasional

(Aris Hardinanto)

terjebak dalam pengulangan narasi yang sekadar mengganti perspektif kolonial dengan perspektif nasional tanpa terlebih dahulu menguji bagaimana suatu peristiwa direpresentasikan oleh tradisi sumber yang berbeda (Purwanto, 2001). Konsekuensi hal tersebut adalah tokoh yang dikategorikan sebagai pemberontak dalam arsip kolonial dapat dipahami berdasarkan terminologi pihak kolonial, sedangkan sumber lokal tradisional sering ditempatkan sebagai narasi yang sarat kepentingan legitimasi politik. Kedua kecenderungan tersebut berpotensi mengaburkan kompleksitas sejarah dan menghasilkan penilaian yang tidak proporsional terhadap kedudukan seorang tokoh daerah dalam dinamika perlawanan kolonialisme di Nusantara.

Persoalan tersebut relevan dalam menilai kedudukan historis dari tokoh bernama Raden Trunojoyo (selanjutnya disebut Trunojoyo). Perang Trunojoyo kerap ditempatkan sebagai konflik internal Mataram Islam atau pemberontakan terhadap Amangkurat I dan Amangkurat II. Kategorisasi tersebut dapat menjelaskan fase awal konflik, tetapi tidak memadai untuk menggambarkan keseluruhan perkembangan peperangan. Perubahan mendasar terjadi ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC atau Kompeni) memilih untuk mendukung Mataram Islam dan terlibat secara langsung dalam perang melawan Trunojoyo. Pengerahan pasukan, persenjataan, logistik, armada, dan ekspedisi militer VOC menunjukkan bahwa konflik tersebut berkembang melampaui sengketa internal Mataram dan memperoleh dimensi konfrontasi terhadap kekuatan kolonial.

Rekonstruksi posisi historis Trunojoyo dalam penelitian ini dilakukan melalui pembacaan terhadap sumber-sumber sejarah yang berasal dari tradisi historiografi berbeda, misalnya Babad Trunajaya CS 15 sebagai representasi historiografi lokal Jawa dan *Dagh Register Gehouden int Casteel Batavia vant Passerende daer ter Plaetse als Over Geheel Nederlandts-India* (*Dagh Register*) sebagai arsip administratif VOC. Keduanya memiliki karakter, tujuan, bahasa, dan konteks produksi yang berbeda.

Babad Trunajaya CS 15 memadukan memori historis dengan konvensi sastra, simbolisme, dan pandangan politik Jawa, sedangkan *Dagh Register* merupakan produk birokrasi kolonial yang merekam peristiwa berdasarkan kebutuhan administratif dan kepentingan politik VOC. Perbedaan tersebut justru memungkinkan dilakukannya kritik dan verifikasi silang sehingga rekonstruksi sejarah

tidak bergantung pada perspektif tunggal (Purwanto, 2001). Persesuaian fakta antara kedua sumber memberikan dasar penting untuk meninjau kembali kategorisasi perang Trunojoyo sebagai konflik dinasti semata. Keduanya terlihat menunjukkan keterlibatan langsung VOC dalam peperangan, terbentuknya persekutuan Mataram dan VOC, dan berlangsungnya pertempuran antara pasukan Trunojoyo dengan Kompeni. Di satu pihak, Amangkurat II semakin bergantung pada dukungan militer VOC untuk memulihkan dan mempertahankan kekuasaannya, yang kemudian disertai pemberian berbagai konsesi politik dan ekonomi kepada Kompeni. Di pihak lain, Trunojoyo menjadi sasaran operasi militer VOC karena kekuatan politik maupun militernya menghalangi kepentingan Mataram sekaligus kepentingan Kompeni di Jawa. Dengan demikian, keterlibatan aktif VOC mentransformasikan konflik internal Mataram menjadi konfrontasi antara Trunojoyo dengan koalisi VOC dan Mataram Islam.

Transformasi tersebut juga menuntut pembacaan kritis terhadap terminologi kolonial. Penyebutan Trunojoyo sebagai *rebel* atau *rebellige* dalam arsip VOC tidak dapat diperlakukan sebagai kategorisasi historis yang netral karena istilah tersebut digunakan oleh institusi yang secara langsung sedang berperang dengannya. Sebaliknya, sumber lokal juga tidak dapat diterima secara literal hanya karena menawarkan perspektif yang berbeda. Setiap sumber harus ditempatkan dalam konteks produksi, kepentingan politik, dan struktur representasinya (Purwanto, 2001). Oleh karena itu, pembacaan komparatif tidak dimaksudkan untuk menentukan bahwa historiografi lokal lebih benar daripada arsip kolonial atau sebaliknya, melainkan untuk menemukan fakta yang tetap muncul di tengah perbedaan representasi. Salah satu titik persesuaian terpenting adalah bahwa VOC secara nyata menjadi aktor militer yang berperang langsung melawan Trunojoyo. Hubungan Trunojoyo dengan VOC juga harus dipahami secara kronologis. Komunikasi diplomatik pada fase awal konflik tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Trunojoyo merupakan sekutu VOC ataupun meniadakan karakter perlawanannya pada fase berikutnya. Hubungan politik selama peperangan bersifat dinamis dan berubah sesuai perkembangan kepentingan para pihak. Karena itu, surat-menyurat dan negosiasi awal harus ditempatkan dalam rangkaian peristiwa yang mencakup kegagalan diplomasi, keberpihakan VOC kepada Mataram Islam, deklarasi perang, pengerahan

ekspedisi militer, pengepungan pusat kekuasaan Trunojoyo, serta pengejaran hingga kelak berakhirnya perlawanan di sekitar kawasan Ngantang, kabupaten Malang. Penilaian yang hanya bertumpu pada satu fase konflik berisiko menghasilkan kesimpulan ahistoris karena mengabaikan transformasi hubungan politik dan militer sepanjang peperangan. Konteks tersebut mempunyai implikasi penting terhadap penilaian Trunojoyo sebagai calon pahlawan nasional.

Kelayakannya tidak dapat dibangun atas asumsi bahwa setiap tokoh yang pernah berperang melawan Belanda secara otomatis dapat memenuhi kualifikasi kepahlawanan. Penilaian harus didasarkan pada rekonstruksi historis mengenai karakter perjuangan, kepe-mimpinan, kontinuitas (keberlanjutan perlawanan), pengorbanan, serta dampaknya terhadap perkembangan kolonialisme di Nusantara. Dalam konteks Trunojoyo, persoalannya bukan sekadar apakah ia pernah bertempur melawan VOC, tetapi apakah keseluruhan perjalanan perjuangannya menunjukkan perlawanan nyata dan berkelanjutan terhadap ekspansi politik dan militer Kompeni. Penilaian tersebut selanjutnya harus ditempatkan dalam kerangka hukum positif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009) menetapkan parameter normatif mengenai subjek, kualitas perjuangan, keteladanan, pengabdian, dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional. Karena Trunojoyo hidup pada abad ke-17, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep bangsa, negara, kemerdekaan, dan kepahlawanan dalam hukum modern tidak dapat diterapkan secara mekanis terhadap realitas politik zamannya. Sebaliknya, fakta sejarah mengenai perjuangannya perlu direkonstruksi terlebih dahulu, kemudian dianalisis relevansinya terhadap unsur-unsur yang ditentukan dalam UU 20/2009. Integrasi penelitian sejarah, filologi, dan hukum diperlukan agar penilaian tidak terjebak pada anakronisme sejarah maupun kesimpulan yuridis yang tidak memiliki dasar faktual. Dengan demikian, persoalan mengenai Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bukan sekadar perubahan label dari “pemberontak” menjadi “pahlawan”, lebih lanjut merupakan persoalan bagaimana kedudukan historisnya direkonstruksi berdasarkan sumber yang berbeda dan bagaimana hasil rekonstruksi tersebut diuji berdasarkan kualifikasi hukum positif.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini akan menjawab dua permasalahan utama: per-

tama, apakah Trunojoyo melakukan perlawanan terhadap koalisi VOC dan Mataram Islam sehingga memiliki dasar historis dan yuridis untuk diajukan sebagai pahlawan nasional; dan kedua, bagaimana proses transformasi perjuangan Trunojoyo dari konflik dengan Mataram Islam menjadi perlawanan terhadap koalisi VOC dan Mataram Islam. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan mengintegrasikan metode sejarah, pendekatan filologi, dan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh dasar akademik dalam menilai kelayakan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional berdasarkan UU 20/2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dipadukan dengan filologi dan telaah hukum. Integrasi ketiga hal tersebut diperlukan karena objek penelitian mencakup peristiwa sejarah, manuskrip dan arsip berbahasa Jawa serta Belanda, sekaligus hukum positif mengenai pemberian gelar pahlawan nasional. Metode sejarah digunakan untuk merekonstruksi perkembangan hubungan Trunojoyo, Mataram Islam, dan VOC; filologi digunakan untuk memperoleh pembacaan terhadap sumber sejarah tekstual sehingga hasil telaah dapat dipertanggungjawabkan. Analisis hukum digunakan terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menilai hasil telaah historis dan filologis terhadap kualifikasi pahlawan nasional.

Metode sejarah dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986; Kuntowijoyo, 2013). Heuristik dilakukan dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber primer, terutama edisi cetak *Dagh Register Gehouden int Casteel Batavia vant Passerende daer ter Plaetse als Over Geheel Nederlandts-India*, arsip pindai *Nationaal Archief* berjudul *Archive number 1.04.02: Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 1602-1795 (1811)*, dan manuskrip pindai Babad Trunajaya CS 15.

Sumber sekunder digunakan untuk menempatkan sumber primer dalam konteks historiografi yang lebih luas. Kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal. Kritik eksternal digunakan untuk mengidentifikasi autentisitas, asal-usul, bentuk, penyalinan, dan transmisi dokumen, sedangkan kritik internal menguji kredibilitas informasi, kedudukan pembuat sumber, kepentingan politik yang

melatarbelakanginya, serta konsistensinya dengan sumber lain. Tahapan ini penting karena *Dagh Register* merupakan produk administratif VOC, sedangkan Babad Trunajaya merupakan historiografi tradisional Jawa. Keduanya tidak diperlakukan sebagai representasi objektif yang bebas kepentingan. Fakta yang telah diverifikasi selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan hubungan kronologis dan kausal sebelum disusun dalam bentuk historiografi.

Pemanfaatan sumber digital berupa hasil pindah atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tersedia di laman web tetap mengikuti prinsip kritik sejarah melalui pemeriksaan asal koleksi, karakter dokumen, kronologi, dan keterhubungannya dengan sumber lain.

Filologi digunakan karena sumber primer berupa manuskrip dan arsip VOC memuat bahasa Jawa serta bahasa Belanda abad ke-17 dengan variasi ejaan nama tokoh, wilayah, jabatan, dan istilah politik. Analisis filologi dilaksanakan melalui identifikasi naskah, pembacaan paleografis, transliterasi, perbandingan varian bacaan, dan penerjemahan kontekstual. Tujuannya memperoleh bacaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mempertahankan karakter kebahasaan dan konteks historis sumber. Dengan demikian, filologi digunakan untuk mengungkap makna historis manuskrip melalui analisis tekstual, linguistik, dan kontekstual secara sistematis (Pardayeva et al., 2025).

Hasil telaah historis dan filologis tersebut selanjutnya dianalisis kembali menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam ilmu hukum (Marzuki, 2023). Hasil telaah historis dan filologis digunakan sebagai dasar atau pertimbangan pemenuhan kualifikasi yuridis pahlawan nasional berdasarkan UU 20/2009, khususnya Pasal 25 mengenai persyaratan umum dan Pasal 26 mengenai persyaratan khusus pemberian gelar. Analisis hukum tidak digunakan untuk menentukan kebenaran sejarah, tetapi untuk menguji kesesuaian dan konsekuensi yuridis penelaahan melalui metode sejarah dan filologi terhadap persyaratan gelar pahlawan nasional (Langbroek et al., 2017; Majeed et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan Trunojoyo berakar pada krisis politik, ekonomi, dan sosial di masa pemerintahan Amangkurat I sebagaimana terekam dalam *Dagh Register*. Arsip Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut ANRI) mengate-

gorikan *Dagh Register* sebagai jurnal harian pemerintahan VOC di Benteng Batavia yang mencatat berbagai peristiwa politik, militer, ekonomi, diplomatik, dan administratif yang berlangsung di wilayah kekuasaan VOC maupun daerah-daerah lain di Nusantara selama periode 1624 hingga 1682. Kumpulan jurnal tersebut diterbitkan dalam 31 jilid antara tahun 1887 hingga 1931 oleh tiga Wakil Direktur *Nationaal Archief* di Den Haag dan tiga Direktur *Landsarchief* di Batavia, lembaga yang kemudian menjadi cikal bakal ANRI. Proses penerbitannya berlangsung selama 44 tahun melalui transkripsi yang dilakukan secara cermat terhadap manuskrip asli. Secara keseluruhan, edisi tersebut mencakup 16.175 halaman dokumen serta 754 halaman indeks sehingga menjadi salah satu publikasi arsip VOC terbesar yang pernah diterbitkan. Sembilan jilid pertama diterbitkan di Den Haag dengan dukungan Kementerian Koloni Belanda, sedangkan dua puluh dua jilid berikutnya diterbitkan di Batavia atas dukungan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan) (ANRI, 2026).

Kedudukan *Dagh Register* sebagai sumber utama dalam rekonstruksi perlawanan Trunojoyo berkaitan dengan karakter dokumenternya sebagai catatan sezaman. ANRI mengakui *Dagh Register* sebagai salah satu sumber primer terbitan terpenting untuk sejarah Nusantara sebelum tahun 1800, khususnya bagi penelitian mengenai sejarah politik, kolonial, dan maritim Asia Tenggara. Publikasi ini telah menjadi rujukan dalam berbagai penelitian sejarah karena memuat laporan harian pejabat VOC mengenai dinamika hubungan antara Kompeni dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Meskipun demikian, rangkaian keseluruhan dokumentasinya tidak sepenuhnya utuh. Ketika proyek penerbitan diawasi oleh J.A. van der Chijs selaku *Landsarchivaris* (1892–1905), diketahui bahwa manuskrip asli untuk beberapa tahun telah hilang dari arsip di Batavia maupun Den Haag, yaitu tahun 1630, 1635, 1638, 1639, 1646, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655, 1658, 1660, dan 1662 sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam edisi yang diterbitkan (ANRI, 2026). Dalam konteks politik Jawa abad ke-17 yang terekam dalam sumber-sumber tersebut, perlawanan Trunojoyo muncul di tengah meningkatnya ketegangan terhadap pemerintahan Amangkurat I. Sentralisasi kekuasaan, konflik dengan bangsawan dan ulama, serta tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam kerajaan menimbulkan ketidakpuasan di berbagai daerah. Sebagai

bangsawan Madura keturunan Cakraningrat I, Trunojoyo memiliki basis politik untuk menghimpun kekuatan dari Madura, elite Jawa Timur, masyarakat pesisir, dan kelompok Makassar. Perlawanan Trunojoyo kemudian berkembang melampaui konflik lokal menjadi kekuatan politik regional di Jawa Timur (De Graaf, 1958; Pigeaud & De Graaf, 1976).

Kapasitas politik tersebut tercermin dalam laporan Mayor Christiaan Poleman pada 29 September 1676 yang menyebut Trunojoyo sebagai Panambahan atau Panambaan Madura dengan pengaruh di Surabaya, Gresik, Gombong, dan wilayah lain. Pada November 1676, ia bahkan disebut sebagai *Panambahan of Radja Troena Jaja*. Penggunaan gelar Panambahan dan Raja menunjukkan bahwa VOC mengenali Trunojoyo sebagai figur dengan otoritas politik dan teritorial, bukan sekadar pemimpin kelompok bersenjata (Van der Chijs, 1903). Meskipun telah berkembang menjadi kekuatan politik regional, hubungan Trunojoyo dengan VOC pada mulanya belum bersifat konfrontatif. Pada November 1676, utusannya datang ke Batavia dan menyampaikan surat mengenai keadaan politik, kemenangan atas Mataram Islam, serta wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Namun, kekalahan pasukan Mataram Islam menyebabkan Pangeran Adipati Anom, yang kemudian menjadi Amangkurat II, semakin bergantung pada bantuan VOC. Kompeni pada akhirnya memilih mempertahankan Mataram Islam dan meminta Trunojoyo menghentikan peperangan (Van der Chijs, 1903). Sepanjang 1677, VOC masih berusaha menempuh jalur diplomasi. Speelman meminta Trunojoyo datang ke Jepara atau mengirim utusan dengan kewenangan penuh, bahkan terdapat kemungkinan pengakuannya sebagai *vry Prins van Madura*.

Kegagalan mencapai kompromi, disertai keputusan VOC untuk berpihak kepada Mataram Islam, kemudian mengubah hubungan kedua pihak secara mendasar. Pada Mei 1677, VOC secara resmi memilih jalan perang dan memerintahkan agar Trunojoyo dibawa hidup ataupun mati kepada Kompeni (Van der Chijs, 1904). Sejak keputusan tersebut, hubungan yang sebelumnya masih membuka ruang diplomasi berubah menjadi konfrontasi militer langsung antara VOC dan Trunojoyo. Perubahan dari diplomasi menuju konfrontasi tersebut penting untuk memahami karakter perlawanan Trunojoyo terhadap VOC. Korespondensi antara Trunojoyo dan Kompeni pada 1676 merupakan bagian dari fase diplomasi sebelum perang terbuka sehingga

tidak dapat digunakan untuk meniadakan perlawanannya terhadap VOC pada fase berikutnya. *Dagh Register* tanggal 30 Agustus 1678 bahkan menunjukkan bahwa Kompeni sebenarnya dapat memilih berpihak kepada Trunojoyo karena ia diperkirakan mampu memenuhi kepentingan VOC. Namun, Kompeni memilih mempertahankan Mataram Islam karena konfigurasi tersebut dinilai lebih sesuai dengan kepentingan jangka panjangnya (De Haan, 1907). Dengan demikian, korespondensi Trunojoyo–VOC perlu dipahami sebagai bagian dari proses perubahan hubungan politik yang bergerak dari diplomasi menuju konfrontasi bersenjata.

Transformasi hubungan tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan konfigurasi kekuasaan Mataram Islam setelah jatuhnya pusat kerajaan pada 1677. Amangkurat II tidak mempunyai kemampuan militer yang memadai untuk memulihkan kekuasaannya tanpa bantuan eksternal. Dalam keadaan tersebut, VOC menyediakan pasukan, persenjataan, logistik, armada, pembiayaan, dan kepemimpinan operasi militer. Surat Amangkurat II kepada Gubernur Jenderal pada April 1678 bahkan mengakui bahwa kesulitan akibat Trunojoyo dan Panambahan Kajoran tidak dapat diatasi tanpa pertolongan VOC (De Haan, 1907). Bantuan tersebut tidak diberikan tanpa kompensasi. Amangkurat II menyatakan kesediaan membayar utang perang sebesar 310.000 real dan 5.000 koyan beras serta memberikan keuntungan perdagangan dan privilese ekonomi kepada VOC (De Haan, 1907).

Intervensi Kompeni dengan demikian bukan sekadar bantuan militer untuk memulihkan kerajaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbesar ketergantungan Mataram Islam sekaligus memperluas pengaruh ekonomi-politik VOC di Jawa. Persekutuan Amangkurat II dengan VOC selanjutnya mengubah konflik antarkekuatan lokal menjadi peperangan yang secara langsung melibatkan kekuatan kolonial Eropa. Fase menentukan berlangsung ketika VOC menyerang pusat kekuasaan Trunojoyo di Kediri melalui ekspedisi yang dipimpin Anthonio Hurd. Operasi tersebut melibatkan pengerahan pasukan, meriam, amunisi, logistik, transportasi, dan koordinasi dengan penguasa lokal. Besarnya persiapan menunjukkan bahwa VOC memandang Trunojoyo sebagai kekuatan regional yang memerlukan kampanye militer terorganisasi (De Haan, 1907). Menghadapi ekspedisi tersebut, Trunojoyo mengirim pasukan ke Demak, Grobogan, dan sekitar Semarang untuk meng-

ganggu jalur komunikasi dan memecah konsentrasi pasukan Kompeni.

Keunggulan persenjataan, logistik, dan koordinasi koalisi VOC–Mataram Islam akhirnya memungkinkan Kediri direbut pada penghujung 1678. Jatuhnya pusat kekuasaan tersebut, bagaimanapun, tidak mengakhiri perlawanan Trunojoyo. *Dagh Register* tanggal 8 Januari 1679 mencatat bahwa ia membangun pertahanan baru beberapa mil dari Kediri (De Haan, 1909). Perlawanan kemudian bergerak melalui Blitar menuju kawasan Malang, Batu, dan Ngantang. Tekanan militer yang berkelanjutan disertai kelangkaan logistik akhirnya menyebabkan Trunojoyo tertangkap pada akhir Desember 1679. Ia kemudian diserahkan kepada Amangkurat II dan dieksekusi pada 2 Januari 1680 di Ngantang, Kabupaten Malang, wilayah perbatasan dengan Kediri (Nationaal Archief, 1811). Bahkan setelah kematiannya, VOC masih melakukan operasi terhadap kelompok pendukung Trunojoyo pada Februari dan Maret 1680 (De Haan, 1912). Keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan kapasitas Trunojoyo sebagai pemimpin perang regional. Ia membangun pusat kekuasaan di Kediri, mengoordinasikan kekuatan lintas wilayah, mengganggu jaringan logistik VOC, mempertahankan jaringan politik, dan meneruskan perlawanan setelah kehilangan pusat pemerintahannya. Pada sisi lain, VOC harus mengubah pola operasinya dari pengamanan wilayah pesisir menjadi kampanye militer ke pedalaman. Skala respons Kompeni tersebut menunjukkan besarnya ancaman politik dan militer yang ditimbulkan oleh kekuatan Trunojoyo.

Penelaahan historis berdasarkan dokumentasi VOC tersebut memperoleh perspektif pembandingan dari *Babad Trunajaya CS 15*, manuskrip berbahasa Jawa Baru beraksara Jawa yang disusun dalam bentuk tembang macapat. Berbeda dengan *Dagh Register* yang merupakan dokumentasi sezaman, naskah babad yang tersedia merupakan produk transmisi historiografi abad ke-19 sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai laporan langsung atas peristiwa abad ke-17. Nilainya terletak pada rekaman memori historis Jawa yang dapat diperbandingkan dengan dokumentasi VOC melalui kritik sumber.

Pada halaman-halaman awal naskah terdapat sejumlah keterangan beraksara Latin yang memberikan informasi mengenai riwayat manuskrip. Tulisan “No. 15” menunjukkan nomor urut koleksi, sedangkan “Govr.-eigendom” merupakan singkatan yang merujuk pada *Gouvernementseigendom* atau milik Pemerintah Belanda. Terdapat pula tulisan inventaris lama

berupa “1.b. No. 23.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada masa kolonial naskah ini telah menjadi bagian dari koleksi resmi Pemerintah Belanda sebelum akhirnya menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada halaman yang sama tercantum keterangan *Fragment van een Javaanschen Babad, behelzende de laatste bedrijven en den ondergang van Troena-djaja*, yang berarti “Fragmen sebuah Babad Jawa yang memuat kisah peristiwa-peristiwa terakhir dan kejatuhan Troenadjaja.” Di bawahnya terdapat keterangan *afgeschreven door Mas Djaja Premadi naar een door hem gevonden handschrift. Batavia 1864*, yang menunjukkan bahwa naskah tersebut disalin oleh Mas Djaja Premadi berdasarkan sebuah manuskrip yang ditemukannya di Batavia pada tahun 1864. Keterangan ini menegaskan bahwa Mas Djaja Premadi berkedudukan sebagai penyalin, bukan pengarang teks, sehingga tahun 1864 merupakan tahun penyalinan manuskrip tersebut dan bukan serta-merta tahun penyusunan pertama teks *Babad Trunajaya*. Identitas pengarang maupun waktu penyusunan bentuk awal teksnya belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan tersebut.

Persoalan penanggalan menjadi lebih kompleks karena bagian pembuka babad memuat candrasengkala *dahana trus sapteng jagad*. Apabila unsur-unsurnya dikonversi dengan Jagad = 1, Sapta ing/Sapteng = 7, Trus = 9, dan Dahana = 3, candrasengkala tersebut menghasilkan angka 1793 Tahun Jawa (Wawu). Penanggalan ini perlu dibaca bersama keterangan penyalinan “Batavia 1864” di atas. Fungsi candrasengkala tersebut dalam sejarah tekstual naskah perlu ditelaah lebih lanjut sebelum digunakan sebagai waktu penyusunan manuskrip yang sama. Satu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa manuskrip yang kini tersedia merupakan bagian dari transmisi tekstual *Babad Trunajaya* pada abad ke-19. Terlepas dari persoalan transmisi dan penanggalannya, pembacaan filologis terhadap isi babad memperlihatkan gambaran keterlibatan langsung Kompeni dalam peperangan. Frasa berbahasa Jawa, yaitu “*kang wadya kumpeni, atenggara tambur*” terlihat menggambarkan pasukan Kompeni dalam barisan perang, sedangkan “*ingkang dadya dhadhane kumpeni, prange golong mimis*” menunjukkan konteks operasi militer yang melibatkan Kompeni.

Keterlibatan Trunojoyo dinyatakan melalui “*Trunajaya angawaki ing ngayuda*”, sementara “*katadhahan dening bala kumpeni*” menempatkan pasukannya berhadapan langsung dengan pasukan Kompeni. Penyebutan senjata,

tambur Belanda, dan prajurit yang terluka semakin memperjelas gambaran pertempuran bersenjata antara kedua pihak. Perbedaan karakter *Babad Trunajaya* dan *Dagh Register* justru menjadikan persesuaian informasi di antara keduanya penting. Babad merupakan historiografi tradisional Jawa yang mengandung unsur sastra dan simbolik, sedangkan *Dagh Register* merupakan produk administrasi VOC yang mencatat diplomasi, logistik, keputusan politik, dan operasi militer. Meskipun berasal dari tradisi historiografis yang berbeda, keduanya menunjukkan keterlibatan langsung VOC, persekutuan Kompeni dengan Mataram Islam, kepemimpinan Trunojoyo dalam menghadapi kedua kekuatan tersebut, serta kesinambungan perlawanannya hingga fase terakhir.

Konvergensi kedua sumber tersebut memberikan dasar historis bahwa perang Trunojoyo tidak memadai apabila hanya dipahami sebagai pemberontakan internal terhadap Mataram Islam. Hal ini tidak berarti bahwa sejak awal perjuangan Trunojoyo didasarkan pada nasionalisme Indonesia dalam pengertian modern, sebab konsep bangsa dan negara Indonesia belum terbentuk pada abad ke-17. Pada fase awal, konflik berakar pada pertentangan dengan Mataram Islam, sementara hubungan Trunojoyo dengan VOC masih membuka ruang diplomasi. Karakter konflik kemudian berubah ketika VOC bersekutu dengan Amangkurat II, menyatakan perang, mengerahkan pasukan, dan melaksanakan operasi militer untuk menghancurkan kekuatan Trunojoyo. Sejak fase tersebut, pihak yang dihadapi Trunojoyo secara objektif mencakup VOC sebagai kekuatan kolonial Eropa. Dimensi kolonial tersebut semakin terlihat dari konsekuensi intervensi VOC terhadap hubungan politik antara Kompeni dan Mataram Islam. Bantuan militer menghasilkan utang perang, konsesi ekonomi, dan perluasan privilese VOC. Kemenangan koalisi dengan demikian tidak sekadar memulihkan kekuasaan Amangkurat II, tetapi sekaligus meningkatkan ketergantungan Mataram Islam dan memperluas pengaruh politik serta ekonomi Kompeni di Jawa. Dalam konteks inilah perlawanan Trunojoyo pada fase 1677–1679 dapat ditempatkan sebagai hambatan terhadap konsolidasi kekuasaan VOC.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, penggunaan istilah *rebel* atau *rebellige* (De Haan, 1907) yang berarti pemberontak dari VOC terhadap Trunojoyo dalam arsip-arsipnya perlu ditempatkan dalam konteks institusional sumbernya dan tidak diperlakukan sebagai kategorisasi historis yang netral. Istilah tersebut digunakan

oleh institusi yang sedang terlibat dalam perang melawan Trunojoyo. Pada saat yang sama, dokumentasi VOC sendiri menunjukkan bahwa Trunojoyo merupakan pemimpin politik dan militer yang dihadapi melalui keputusan perang, pengerahan pasukan, dan ekspedisi bersenjata. Oleh karena itu, kategorisasi politik VOC terhadap Trunojoyo perlu dibedakan dari penilaian historis terhadap karakter perjuangannya.

Penelaahan historis dan filologis tersebut selanjutnya relevan untuk menilai perjuangan Trunojoyo berdasarkan persyaratan pemberian Gelar Pahlawan Nasional dalam UU 20/2009. Pasal 1 angka 4 mengakomodasi seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI sehingga membuka kemungkinan penilaian terhadap tokoh-tokoh prakemerdekaan. Dalam kerangka Pasal 25, perjuangan Trunojoyo berlangsung di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Indonesia. Adapun persyaratan mengenai integritas moral, keteladanan, kelakuan baik, dan kesetiaan perlu dinilai berdasarkan konteks historis dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan kategorisasi politik VOC terhadap pihak yang sedang diperangnya. Demikian pula, eksekusi Trunojoyo oleh Amangkurat II tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f. Unsur jasa terhadap bangsa dan negara dalam konteks tokoh abad ke-17 juga tidak dapat dimaknai sebagai pengabdian secara literal kepada Republik Indonesia yang pada masa tersebut belum terbentuk. Penilaiannya perlu ditempatkan dalam konteks perjuangan prakeemerdekaan, antara lain melalui tindakan mempertahankan kemandirian politik masyarakat dan wilayah Nusantara serta menghadapi penetrasi kekuasaan kolonial. Pendekatan kontekstual yang sama diperlukan dalam menilai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU 20/2009.

Persyaratan Pasal 26 memperoleh dukungan historis dari aspek kepemimpinan dan kesinambungan perjuangan Trunojoyo. Ia menguasai wilayah, membangun pusat kekuasaan di Kediri, mengoordinasikan jaringan militer regional, serta menghadapi ekspedisi VOC. Setelah Surabaya dan Kediri jatuh, Trunojoyo tidak menghentikan perjuangannya, melainkan membangun pertahanan baru dan meneruskan perlawanan hingga ditangkap pada akhir 1679. Kemampuannya membangun koalisi yang melibatkan unsur Madura, Jawa, dan Makassar, disertai adanya pertimbangan VOC untuk mengakuinya sebagai *vry Prins van Madura*, menunjukkan kapasitas

politiknya sebagai pemimpin regional. Sementara itu, unsur semangat kebangsaan dalam Pasal 26 perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan tidak secara anakronistik disamakan dengan nasionalisme Indonesia modern. Parameter yang lebih relevan bagi tokoh abad ke-17 ialah perjuangan mempertahankan kemandirian politik masyarakat dan wilayah Nusantara dalam menghadapi dominasi asing. Diplomasi Trunojoyo dengan VOC pada 1676 tidak dengan sendirinya meniadakan unsur tersebut karena hubungan kedua pihak kemudian mengalami transformasi menjadi perang terbuka. Sejak VOC memilih jalan perang pada 1677 hingga berakhirnya perjuangan pada 1679, Trunojoyo secara nyata berada dalam konfrontasi bersenjata dengan Kompeni.

Dengan demikian, *Babad Trunajaya CS 15* dan *Dagh Register*, meskipun memiliki karakter, konteks produksi, dan jarak temporal yang berbeda, memberikan landasan historis yang saling menguatkan mengenai kepemimpinan Trunojoyo, keterlibatan langsung VOC dalam peperangan, kesinambungan perjuangan, serta signifikansi politik dan militernya. Konflik yang pada mulanya berakar pada pertentangan dengan Mataram Islam mengalami transformasi ketika VOC bersekutu dengan Amangkurat II dan secara langsung mengerahkan kekuatan militer untuk menghancurkan Trunojoyo. Sejak fase tersebut, perjuangan Trunojoyo memiliki dimensi perlawanan terhadap ekspansi kolonial VOC.

Hasil telaah historis dan filologis tersebut memberikan dasar akademik untuk menilai kesesuaian perjuangan Trunojoyo dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009. Bukti mengenai kepemimpinan regional, kesinambungan perjuangan, konfrontasi langsung dengan VOC, serta konsekuensi politik intervensi Kompeni menjadi unsur penting dalam penilaian tersebut. Adapun keputusan mengenai pemberian Gelar Pahlawan Nasional tetap berada dalam mekanisme dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Perbandingan sumber historis dan filologis antara *Babad Trunajaya CS 15* dengan *Dagh Register* maupun arsip VOC dari Nationaal Archief di negara Belanda menunjukkan korespondensi yang sangat kuat mengenai peperangan yang dilakukan Trunojoyo. Meskipun berasal dari tradisi berbeda, kesemuanya memiliki peranan merekam persekutuan VOC dan Mata-

ram Islam, keterlibatan langsung pasukan Kompeni, pertempuran dengan pasukan Trunojoyo, jatuhnya Kediri, keberlanjutan perlawanan di pedalaman Jawa Timur, hingga penangkapan dan gugurnya Trunojoyo. Kesesuaian hal-hal tersebut menegaskan bahwa perlawanan Trunojoyo terhadap VOC bukan konstruksi historiografi nasional modern. Hubungan Trunojoyo dan VOC pada 1676 masih bersifat diplomatik, tetapi berubah ketika VOC mendukung Mataram Islam menyatakan perang pada 1677, dan mengerahkan kekuatan militer. Sejak itu, konflik yang semula berakar pada persoalan internal Mataram Islam berkembang menjadi konfrontasi bersenjata melawan koalisi VOC dan Mataram Islam. Persekutuan tersebut tidak hanya memulihkan kekuasaan Amangkurat II, tetapi juga memperbesar ketergantungan Mataram Islam melalui bantuan militer yang diikuti kewajiban pembayaran serta konsesi ekonomi dan politik kepada VOC. Dalam konfigurasi peristiwa tersebut, perlawanan Trunojoyo secara objektif menghambat konsolidasi kekuasaan kolonial Kompeni, sedangkan sebutan *rebel* atau *rebellige* dalam arsip VOC harus dipahami sebagai kategorisasi politik pihak yang berperang. Rekonstruksi atas kronologis peperangan menunjukkan Trunojoyo sebagai pemimpin politik dan militer regional yang menghimpun kekuatan Madura, Jawa, dan Makassar, menguasai wilayah strategis, membangun pusat kekuasaan di Kediri, serta meneruskan perlawanan hingga akhir 1679. Secara yuridis, fakta tersebut relevan terhadap Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009 karena Trunojoyo berjuang di wilayah yang sekarang menjadi bagian NKRI, memimpin perjuangan bersenjata secara berkelanjutan, dan berhadapan langsung dengan kekuatan kolonial VOC. Dengan demikian, Trunojoyo lebih tepat dipahami sebagai pemimpin perlawanan terhadap koalisi VOC dan Mataram Islam daripada simplifikasi sekadar pemberontakan semata, sehingga terdapat landasan historis, filologis dan yuridis yang sangat kuat untuk mempertimbangkannya sebagai pahlawan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- De Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. Th. (1976). *Islamic states in Java 1500–1700: Eight Dutch books and articles by Dr. H. J. de Graaf*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Gottschalk, L. (1986). *Understanding history: A primer of historical method*. New York: Alfred A. Knopf.

Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Arsip dan Sumber Historis Tercetak

De Haan, F. (Ed.). (1907). Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India: Anno 1678. Batavia: Landsdrukkerij.

De Haan, F. (Ed.). (1909). Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India: Anno 1679. Batavia: Landsdrukkerij.

De Haan, F. (Ed.). (1912). Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India: Anno 1680. Batavia: Landsdrukkerij.

Van der Chijs, J. A. (Ed.). (1903). Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India: Anno 1676. Batavia: Landsdrukkerij.

Van der Chijs, J. A. (Ed.). (1904). Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India: Anno 1677. Batavia: Landsdrukkerij.

Arsip

Nationaal Archief. (n.d.). Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602–1795 (1811) (Inventory Nos. 1345, 1351, 1360). Den Haag: Nationaal Archief.

Manuskrip Digital

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (n.d.). Babad Trunajaya (MS CS 15). Khastara: Khazanah Pustaka Nusantara. Accessed from: Khastara Perpustakaan Nasional RI.

Jurnal Online

Langbroek, P., van den Bos, K., Milo, M., Simon Thomas, M., & van Rossum, W. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1–8. doi: 10.18352/ulr.411.

Majeed, N., Hilal, A., & Ilyas, R. (2023). On historical and historical-legal research: Forms, challenges and methodologies. *Pakistan Journal of Social Research*, 5(2), 528–537. doi: 10.52567/pjsr.v5i02.1134.

Pardayeva, I., et al. (2025). Philological methods in the historical interpretation of library artifacts and manuscripts. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 15(2), 174–183. doi: 10.51983/ijiss-2025.IJISS.15.2.24.

Purwanto, B. (2001). Historisme baru dan kesadaran dekonstruktif: Kajian kritis terhadap historiografi Indonesiasentris. *Humaniora*, 13(1), 1–13. doi: 10.22146/jh.709.

Website

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Daily Journal. Accessed from: https://sejarah-nusantara.anri.go.id/daily_journals/

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Daily Journal Volumes. Accessed from: https://sejarah-nusantara.anri.go.id/daily_journals_volumes/